

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI DI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

Oleh

BETRIS OKTARINI ARISTA

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik antara Bappeda dan Balitbangda provinsi lampung. Permasalahan utamanya terletak pada perbedaan tingkat keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Bappeda dan Balitbangda serta menganalisis aspek aspek yang mempengaruhi perbedaan tersebut dengan menggunakan teori De Coning *et al.* (2018) yang mencakup tujuh aspek: *content, context, commitment, capacity, clients and coalitions, communication, serta coordination*. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di bappeda dan balitbangda provinsi lampung. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dianalisis dengan model miles, huberman, serta divalidasi melalui triangulasi sumber. hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di bappeda provinsi lampung lebih unggul dalam pemahaman isi kebijakan, kapasitas sdm, koordinasi, serta komitmen para pelaksana, namun masih perlu memperkuat mekanisme umpan balik dan komunikasi dua arah. Sementara di balitbangda cukup efektif dalam pelayanan langsung dan dedikasi pelaksana, tetapi masih lemah pada pembaruan data digital, kolaborasi eksternal, serta koordinasi berkelanjutan. Bappeda disarankan memperkuat inovasi digital dan kolaborasi eksternal, sedangkan balitbangda perlu meningkatkan kompetensi teknis, pembaruan data, serta sistem koordinasi antarbidang agar lebih informatif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Implementasi Kebijakan, *Good Governance*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE POLICY IN REGIONAL GOVERNMENT AGENCIES OF LAMPUNG PROVINCE IN 2024

By

BETRIS OKTARINI ARISTA

This study discusses the implementation of the Public Information Disclosure Policy between the Regional Development Planning Agency Bappeda and the Research and Development Agency Balitbangda of Lampung Province. The main problem lies in the difference in the level of success in implementing public information disclosure. This study aims to identify how the policy is implemented in both agencies and to analyze the aspects influencing those differences using the theory of De Coning et al. (2018), which includes seven aspects: content, context, commitment, capacity, clients and coalitions, communication, and coordination. A qualitative case study approach was employed to analyze the implementation process. Data were collected through observation, interviews, and documentation, analyzed using the Miles and Huberman model, and validated through source triangulation. The findings indicate that Bappeda performs better in terms of policy comprehension, human resource capacity, coordination, and commitment, yet needs to strengthen feedback mechanisms and two-way communication. Meanwhile, Balitbangda is relatively effective in direct service and staff dedication but remains weak in data updating, external collaboration, and sustainable coordination. It is recommended that Bappeda enhance digital innovation and external collaboration, while Balitbangda should improve technical competence, data management, and interdepartmental coordination to become more informative and sustainable.

Keywords: Public Information Disclosure, Policy Implementation, Good Governance